

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2011-2016

Oleh :

Endang Septiatuti

Email : endangseptia95@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761

– 63277

ABSTRACT

Granting of regional autonomy to accelerate the realization of community welfare through improving services, empowerment and community participation. The spirit of reform in the field of politics, government and development and society has colored the journey of regional autonomy for the achievement of duties and functions of governance and development, including human development. Human development is always at the forefront of development planning, since the essence of development is human development, the improvement of this priority will also improve the welfare of society as measured by the Human Development Index.

Siak Regency is one of the Daerah Otonomi Baru (DOB) in Indonesia which is ranked fifth best of 34 Districts/Cities in Indonesia, and has been named Indonesia's Best New Autonomous Region, from 10 New Autonomous Region as New Autonomous Region. Then from the 10 new autonomous regions that get the highest score is Siak Regency given by Indonesian Governance Index (IGI).

The purpose of this research is to know the strategy undertaken Siak Regency Government in improving Human Development Index year 2011-2016. This research is a qualitative approach, with descriptive type of data collection is done by observation, interview and documentation. This research was conducted in Siak Regency.

The result of this research is the success of human development which is marked by the increase of Human Development Index is a concrete manifestation that Siak regency has performed its duty in giving maksimal service to society in building quality of human life to achieve decent living. Siak Regency Government has made policy through program that refers to the improvement of Human Development Index, among others: (1) improvement of health degree through life expectancy, (2) increasing the scope and quality of education service, (3) improving decent living standards of the community through the community economy. So with the increasing Human Development Index, the Government has been able to improve the welfare of the community.

Keywords: *Strategy, Human Development Index*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai dua bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia dibagi atas wilayah Provinsi dan Provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa pengertian baru tentang pemerintahan daerah yakni pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Kebijakan Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonom kepada daerah kabupaten dan daerah kota berdasarkan pada azas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung.

Semangat reformasi dibidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai perjalanan

otonomi daerah demi tercapainya tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam perencanaan pembangunan, karena hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia, perbaikan prioritas ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Sejak dimekarkan oleh Kabupaten Bengkalis 15 tahun lalu, Kabupaten Siak terus berkembang dan banyak memperoleh prestasi, dan juga telah berhasil mewujudkan berbagai capaian dan prestasi untuk perubahan masyarakat dan daerah. Kabupaten Siak mendapat sejumlah penghargaan atas keberhasilan pembangunan hampir disetiap bidang yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Bahkan kini Kabupaten Siak meraih penghargaan sebagai Daerah Otonom Baru terbaik se-Indonesia.

Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) terbaik se-Indonesia dengan mencapai indeks Tata Kelola Pemerintahan yang baik yakni dengan menduduki peringkat terbaik ke-5 dari 34 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diberikan oleh Indonesian Governance Index (IGI), yang kemudian dilakukan penelitian di 34 sampel daerah, dimana 10 daerah diantaranya merupakan Daerah Otonom Baru (DOB). Kemudian dari 10 daerah otonom baru tersebut dijadikan sampel penelitian dan hanya Kabupaten Siak yang mendapat nilai tertinggi. Adapun 10 daerah otonom baru tersebut ditampilkan oleh tabel sebagai berikut :²

Tabel 1

¹Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004

²<http://m.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336327/kaleidoskop-2014-siak-buktikan-prestasi-sebagai->

[daerah-otonomi-baru](#) diakses pada 24 Desember 2014 pukul 17:11 Wib

**Peringkat Daerah Otonomi Baru (DOB)
Se-Indonesia**

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Siak, Riau
2	Kab. Lombok Utara, NTB
3	Kota Ternate, Maluku Utara
4	Kab. Tanjung Labung Timur, Jambi
5	Kab. Bangka Selatan, Bangka Belitung
6	Kota Tanjung Pinang, Kepri
7	Kota Tangerang selatan, Banten
8	Kab. Sigi, Sulawesi Tengah
9	Kab. Pulau Pisau, Kalteng
10	Kab. Seluma, Bengkulu

Sumber : Rilis IGI Kemitraan.com Edisi Desember 2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Siak berada di peringkat pertama dalam hal tata kelola pemerintahan. Hal ini membuat Kabupaten Siak menjadi daerah percontohan bagi daerah otonomi baru lainnya, Karena Siak merupakan daerah pemekaran yang masih terbilang muda, tetapi Siak sudah memperoleh sejumlah prestasi.

Keberhasilan Siak menjadi salah satu daerah otonomi baru terbaik, dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan meningkatnya IPM bisa dikatakan bahwa pemerintah dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti yang digambarkan dalam table berikut :

Table 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak

Tahun	IPM
2011	70.20 %
2012	70.45 %
2013	70.84 %
2014	71.45 %
2016	72.17 %
2017	72.70 %

Sumber : Bappeda Kabupaten Siak

Table diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2011 sebesar 70.20 dan mengalami kenaikan sebesar 0,35% pada tahun 2012 menjadi 70.45, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,53% pada tahun 2016 menjadi 72.70. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah digambar dalam table diatas tidak terlepas dari indikator atau komponen yang dimiliki IPM itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk atas tiga komponen utama yakni yang terdiri dari indeks harapan hidup (angka harapan hidup), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks Standar hidup layak. Dari masing-masing komponen tersebut mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadikan Kabupaten Siak sebagai tempat belajar bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi, baik di dalam maupun di luar Provinsi Riau. Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur atau komponen tersebut bisa ditingkatkan.

Jika dilihat dari Provinsi Riau, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak berada diperingkat ke-3 setelah Kota Pekanbaru dan Dumai. Sedangkan untuk kategori Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak yang paling tinggi.

Dengan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang mendukung sehingga Kabupaten Siak mengalami peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka dengan itu penulis mengangkat judul penelitian **“Strategi Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2016”**.

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mengelola daerahnya sendiri merupakan kebanggaan bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Seperti Daerah Kabupaten Siak yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik Se-Indonesia dan disertai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun. Maka dengan itu dapat dijadikan contoh bagi daerah otonomi lainnya dalam memajukan daerahnya sendiri menjadi lebih baik. Adapun identifikasi masalah dari hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik se-Indonesia
2. Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai tahun 2016 cenderung meningkat dari 0,25% sampai 0,53%

Dari urian diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah adalah : “Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2016”

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Sehubung dengan tulisan yang dibuat, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Diambil dari Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang Strategi Pemerintah Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Melalui Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Bersemai Tahun 2005-2010 oleh Rannuh Wijaya Putra. Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi peningkatan PAD pada PD. Pelabuhan Dumai Bersemai memiliki strategi

yang meliputi: pembinaan perusahaan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan kemampuan permodalan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan restrukturisasi potensi PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Penerapan strategi *recovery* melihat jumlah permintaan dan restrukturisasi pinjaman yang dilakukan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai dan Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan strategi antisipasi pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan strategi dalam memberdayakan PD. Pelabuhan Dumai Bersemai.

2. Konsep Teori

a. Strategi

Strategi merupakan cara-cara yang mendasar atau fundamental yang akan digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang dihadapi.³

Strategi sering juga disebut dengan rencana tindak (*action plan*), yakni cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, strategi meliputi: *Accountabilities* (memastikan bahwa sasaran akan dicapai), *deadlines* (kapan target diharapkan akan terealisasi), dan *resource requirements* (sumber daya yang diperlukan dalam mencapai target). Secara detail strategi mencakup perencanaan umum terhadap program yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan, belanja yang akan dialokasikan, dan kebijakan umum yang digunakan.⁴

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

³Sondang P. Siagin, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 28.

⁴Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: PT Buku Seru. 2014. Hlm 104

perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, penegakkan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yang akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran.⁶

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, penelitian dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7

⁶Iskandar, *metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, jakarta:Gaung Persada Press, 2008, hlm. 219.

⁷Ayunanda Melliana, dkk, *Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia*

Strategi Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2016

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan sosial.⁷ Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Konsep atau definisi pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan manusia yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Siak merupakan wujud nyata bahwa Kabupaten Siak telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam membangun kualitas hidup manusia untuk mencapai hidup layak. Indeks Pembangunan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel, Jurnal Sains dan Semi Pomits, Vol. 2, No. 2, Jurusan Statistika Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya. 2013

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Siak (Harapan Hidup)

Pembangunan manusia atau upaya untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang lebih panjang dan sehat. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Harapan hidup ini dapat diukur menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya, yaitu Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Dalam meningkatkan harapan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mempunyai program atau kegiatan seperti :

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - a. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - b. Angka Kematian Balita (AKABA)
 - c. Angka Kematian Ibu (AKI)
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Kesehatan
 - a. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - b. Memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

2. Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, dengan sasaran meningkatkan jenjang dan kualitas pendidikan dan ketrampilan penduduk. Strategi yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas jenjang dan kualitas pendidikan, serta peningkatan keterampilan penduduk dengan cara pengembangan sumber daya lokal. Arah kebijakan yang ditempuh dengan peningkatan mutu pendidikan. Capaian kinerja urusan pendidikan dapat terlihat pada capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf melalui pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Rata-Rata Lama Sekolah.

Di sektor pendidikan, sudah banyak pencapaian yang dilakukan khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Suprpto, M.Pd mengatakan :

“Di sektor pendidikan ini, kita telah menerapkan kebijakan, khususnya terkait dengan sarana prasarana dan mutu pendidikan. Program pendidikan dasar dan menengah dari tahun ke tahun terus ditingkatkan dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik baik secara kuantitas maupun kualitas.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa banyak pencapaian yang di peroleh Kabupaten Siak dalam sektor pendidikan yakni melalui kebijakan dan program yang telah diterapkan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.

Adapun beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah dalam meningkatkan pengembangan dan pembangunan pendidikan Kabupaten Siak, antara lain :

1) Peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan

Pemerataan dan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara social, ekonomi, gender dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, yakni :

- a. Memberikan Pendidikan Gratis
- b. Membangun Sarana dan Prasarana Sekolah

2) Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Siak diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peningkatan

mutu pendidikan diarahkan pada perluasan akses inovasi pembelajaran pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan dan menerdaskan sesuai tingkatan perkembangan peserta didik.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pendidikan telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yakni :

- a. Melaksanakan Workshop Penguatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Memberikan Bantuan Hibah Dana Operasional Rombongan Belajar (Rombel)
- c. Memberikan Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi
- d. Memajukan Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi
- e. Melakukan Kerjasama dengan Universitas Ternama di Indonesia

3. Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat

Standar hidup layak masyarakat dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Peningkatan daya beli bisa dilakukan dengan peningkatan pengeluaran perkapita melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan dibentuknya UMKM diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan daya belimasyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok juga ikut meningkat.

Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam meningkatkan standar hidup layak melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya :

1. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam masyarakat itu sendiri. Meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, diantaranya :

1) Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Beberapa upaya meningkatkan Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Siak, diantaranya :

- a. Memberikan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
- b. Memberikan Sertifikasi Halal
- c. Memberikan Merk
- d. Memfasilitasi Kemasan dan Desain Produk

2) Meningkatkan Permodalan UMKM

- a. Memfasilitasi Pinjaman Bunga Murah dengan Pola Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni

Pemerintah Kabupaten Siak bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Riau Kepri (BRK) terkait penyaluran dana pinjaman modal dalam membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). dengan kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dapat mempermudah pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan pinjaman yang diberikan oleh BUMN dan Perbankan melalui KUR dengan bunga yang lebih rendah. Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang ingin membuka usaha dan membutuhkan modal akan dimasukkan ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau lebih dikenal dengan Bank Syariah BAS.

- b. Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 250 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam upaya menumbuhkan wirausahawan baru sebagai penopang kekuatan ekonomi. Pelaku usaha UMK wajib memiliki IUMK agar memiliki legalitas hukum yang jelas, sehingga memudahkan dalam mengakses bantuan dan pinjaman dari perbankan.

Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, pada tahun 2011 sebesar 70,20, tahun 2012 sebesar 77,27, tahun 2013 sebesar 77,44, tahun 2014 sebesar 71,45, tahun 2015 sebesar 72,17 dan

pada tahun 2016 sebesar 72,70. Dengan nilai yang diperoleh Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak menduduki peringkat ketiga dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melaksanakan berbagai kebijakan melalui beberapa program/kegiatan yang memfokuskan pada pengembangan pembangunan manusia, yakni : meningkatkan derajat kesehatan melalui harapan hidup, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, serta meningkatkan pengeluaran perkapita melalui perekonomian masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka Pemerintah telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Siak harus lebih meningkatkan lagi strategi-strategi yang dilakukan dalam peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Siak, baik berupa kebijakan maupun program/kegiatan, hal ini bertujuan agar kedepannya pelaksanaan pengembangan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Siak dapat berjalan secara maksimal serta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak dapat meningkat dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Siak Melalui pelayananan dasar seperti pendidikan dan kesehatan agar tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi. Dan Pemerintah Provinsi Riau harus menyediakan anggaran yang cukup dan sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam meningkatkan Pembangunan Manusia, agar peningkatan pembangunan manusia

yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dapat berjalan secara lancar dan maksimal. Serta diharapkan masyarakat dapat turut serta berperan aktif membantu Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi daerah Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Graфика Persada

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Bratakusumah, Supriady, Deddy dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Frinces, Helfin, Z. 2007. *Strategi: Konsepsi Memenangkan Perang Bisnis*. Yogyakarta : Mida Pustaka

Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Halim Herman Edyanus. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah; Menepis Ego Kedaerahan Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat*. Pekanbaru: Unri Press

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press

Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha, Talizuduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara

Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana

Sabarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Sabli, Beng. 2000. *Gerakan Strategis Pemberdayaan Daerah: Penggesaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah Kabupaten Kepulauan Riau*. Pekanbaru: UNRI Press

Salam, Setyawan Dharma. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan

Satori, Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Buku Seru

Siagin, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suyatno, Bagong & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Tim Suara Pembaharuan. 2002. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Harapan

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Daerah Kab. Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Kab. Siak Nomor 07 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Peraturan Bupati Kab. Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

C. Jurnal dan Skripsi:

Duwiri, Yacobus, Nursini, dan Agussalim. 2010. *Strategi Kebijakan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Merauke*. Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Pasca Sarjana Unhas.

Melliana, Ayunanda, dkk. 2013. *Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel*.

Jurnal Sains dan Semi Pomits. Vol. 2, No. 2, Jurusan Statistika Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

Putra, Wijaya Rannuh. 2015. *Strategi Pemerintah Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan DUMai Bersemai Tahun 2005-2010*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI.

Rahmayuni, Sri. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI.

D. Sumber Lainnya :

<http://m.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336327/kaleidoskop-2014-siak-buktikan-prestasi-sebagai-daerah-otonomi-baru> diakses pada 24 Desember 2014 pukul 17:11 Wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan diakses pada tanggal 23 April 2017, pukul 00.45 Wib.

[Ipm.bps.go.id/page/ipm](http://ipm.bps.go.id/page/ipm) diakses pada tanggal 16 Agustus 2015, pukul 10.07 Wib